		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu, 6 Maret 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 2 Notaris Baru, 3 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa, 19 Maret 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 1 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis, 11 April 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 2 Notaris Baru dan 1 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Senin, 22 April 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 1 Notaris Baru, 1 Notaris Pindah dan 1 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa, 30 April 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 1 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu, 08 Mei 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 4 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis, 13 Juni 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris sebanyak 3 Notaris Pindahan dan 2 Notaris Pengganti.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa, 09 Juli 2019	Terlaksananya Pelantikan 5 Notaris Pengganti, 25 Pejabat PPNS dan Pelantikan 5 JFT Kegiatan Pelantikan ini dihadiri Kadiv Pemasyarakatan, Pargiyono, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Hajerati serta pejabat dari Pemerintah Daerah Terkait. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Susy Susilawati mengungkapkan bahwa pejabat yang dilantik diharapkan berhati-hati, cermat dan teliti dalam pelaksanaan tugas. Pejabat yang dilantik harus bisa mengerti batas-batas kewenangannya. Mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan mengetahui seberapa jauh dapat bertindak serta memiliki integritas moral yang mantap. Segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Khusus untuk PPNS agar selalu melakukan koordinasi dengan penyidik polri sebagai koordinator pengawas (korwas). Untuk Pejabat Fungsional Tertentu diharapkan bisa menjadi motor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mencermati dan

			menghadapi tantangan tersebut, Pejabat Fungsional Tertentu harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis. Semua harus cepat, tanggap dan semangat dalam merespon tuntutan dan harapan masyarakat.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Senin, 24 Juli 2019	Terlaksananya Pelantikan Notaris Pengganti. Dalam sambutannya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris punya wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah/ Janji, sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tapi juga kepada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Tapi kalau punya integritas, akan bisa dilalui.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Senin, 05 Agustus 2019	Terlaksananya Pelantikan 1 Notaris Pengganti. Dalam sambutannya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris punya wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah/ Janji, sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tapi juga kepada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Tapi kalau punya integritas, akan bisa dilalui.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu, 14 Agustus 2019	Terlaksananya Pelantikan 1 Notaris Pengganti. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris punya

			wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah / Janji, sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tetapi juga pada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Banyak notaris yang diperiksa oleh MKNW oleh sebab itu notaris harus selalu menjaga moralitas dan professionalitasnya serta mempunyai integritas, sehingga akan bisa dilalui dengan baik dalam menjalankan profesinya. Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga berharap agar Notaris tidak melulu memikirkan tentang materi, tetapi juga bagi masyarakat yang tidak mampu harus dibantu.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa, 8 Oktober 2019	Terlaksananya pelantikan 3 Notaris Pindah dan 1 Notaris Pengganti. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris mempunyai wewenang untuk memberikan *legal advice* dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak.Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah / Janji, sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tetapi juga pada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Banyak notaris yang diperiksa oleh MKNW, Bahkan ada 2 notaris perempuan yang baru saja tersangkut masalah pidana dan masuk penjara, oleh sebab itu notaris harus selalu menjaga moralitas, professionalitas serta integritasnya, sehingga akan lancar di dalam menjalankan tugas dan profesinya.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan	Terlaksananya pelantikan 2 Notaris Pengganti dan Pelantikan 3 Notaris Pindahan. Dalam

		HAM, Senin, 28 Oktober 2019	sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris mempunyai wewenang memberikan *legal advice* dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah/ Janji. Sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tapi juga kepada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Tapi kalau punya integritas, akan bisa dilalui. Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menyampaikan bahwa pada hari ini beliau menandatangani surat usulan penutupan 6 (enam) akun notaris. Beliau berpesan agar notaris harus benar- benar berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan yang dilakukan.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Selasa, 26 November 2019	Terlaksananya pelantikan 4 Notaris Pengganti. Dalam sambutannya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris punya wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah/ Janji. Sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kadiv yankum berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tapi juga kepada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Tapi kalau punya integritas, akan bisa dilalui. Ibu Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM juga berharap agar Notaris tidak melulu memikirkan tentang materi. Tetapi juga bagi masyarakat yang tidak mampu harus dibantu. diberikan keringanan. Ini bagian dari CSR atau sodaqoh dari Notaris. Pengambilan sumpah/ janji Notaris itu

			dilaksanakan di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Senin 16 Desember 2019	Terlaksananya pelantikan 2 Notaris Pengganti. Dalam sambutannya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jabatan Notaris Pengganti sama kekuatannya dengan Notaris yang digantikan. Notaris punya wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah sebuah perjanjian telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah/ Janji. Sehingga makna dari kegiatan ini sangatlah penting. Kadiv yankum berpesan bahwa seorang Notaris harus jujur. Tidak hanya pada klien, tapi juga kepada diri sendiri. Selain itu, Notaris juga harus menyadari batas kewenangan dan mentaati hukum yang berlaku. Godaan yang menerpa Notaris sangat besar. Tapi kalau punya integritas, akan bisa dilalui. Ibu Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM juga berharap agar Notaris tidak melulu memikirkan tentang materi. Tetapi juga bagi masyarakat yang tidak mampu harus dibantu. diberikan keringanan. Ini bagian dari CSR atau sodaqoh dari Notaris. Pengambilan sumpah/ janji Notaris itu dilaksanakan di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
	h. Sosialisasi layanan kenotariatan	Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Jum'at, 12 Juli 2019	Terlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan notaris, prosedur permohonan notaris sebagai saksi dan permohonan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang melekat dibawahnya. Dalam sosialisasi ini didapatkan kesimpulan bahwa *salah satu peran Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membantu mendongkrak peringkat EODB adalah dengan meng*implementasikan Fidusia Online mulai dari Pendaftaran, Penerbitan SK, Pencarian Data Jaminan Fidusia, dan Perbaikan Sertifikat Fidusia. Perkembangan Pelayanan di Bidang Jaminan Fidusia yang begitu cepat dan semakin mudah, mendorong Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum Jaminan Fidusia serta pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang dieselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ter-

			update, seperti penggunaan dan pemanfaatan unduh data pada Aplikasi Jaminan Fidusia Online, serta untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia terutama berkaitan dengan pengalihan objek Jaminan Fidusia.
	i. Pelantikan PPNS	Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis, 31 Januari 2019	Pengambilan sumpah atau janji jabatan PPNS sebanyak 4 PPNS.
		Ruang Teleconference, Senin, 02 September 2019	Terlaksananya Pelantikan 3 Pejabat PPNS. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Susy Susilawati mengungkapkan bahwa PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa terdapat dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
	j. Sosialisasi layanan AHU lainnya	Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu, 20 Februari 2019	Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) tentang Penguatan Kelembagaan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah ini pesertanya adalah Anggota MPW dan Anggota MPD Seluruh Jawa Timur. Kegiatan ini untuk mengoptimalkan Layanan Kenotariatan di wilayah Provinsi Jawa Timur yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung *e-government*.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kamis, 28 Februari 2019	Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) tentang Target Kinerja Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Jawa Timur pesertanya adalah Seluruh Pimpinan Tinggi, Pejabat Struktural, JFT dan Kepala UPT Jawa Timur. Kegiatan ini untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Target Kinerja Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Jawa Timur.

		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Senin, 11 Maret 2019	Kegiatan Sosialisasi tentang *Online Single Submission* / OSS dan AHU Online (Sistem Administrasi Badan Hukum / SABH dan Sistem Administrasi Badan Usaha / SABU pesertanya adalah Kepala Dinas/Ketua/Pimpinan Lembaga Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Jawa Timur, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, UPT P2T Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Kegiatan Sosialisasi ini untuk mendiseminasikan dan mengoptimalkan pengetahuan mengenai *Online Single Submission* / OSS dan Ditjen AHU Online (SABH dan SABU).
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Selasa, 19 Maret 2019	Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Kelembagaan Majelis Pengawas Daerah Notaris / MPDN pesertanya adalah 18 Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris / MPDN. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penguatan kelembagaan notaris dan memastikan layanan di bidang kenotariatan berjalan dengan baik dan optimal.
		Rollaas Hotel & Resort, Lawang, Kabupaten Malang, Minggu s/d Selasa, 28 s/d 30 April 2019	Kegiatan Sosialisasi Rapat Kolaborasi Investigasi Notaris ini pesertanya adalah 19 (sembilan belas) orang Pegawai/ Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur yang menangani atau terkait tugas dan fungsi Tim Investigasi Notaris. Kegiatan ini adalah untuk member pemahaman tugas dan fungsi Tim Investigasi Notaris kepada unsur-unsur lain diluar divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Mendapatkan pemahaman tata cara administrasi persuratan dan tata cara pertanggungjawaban keuangan bagi Sekretariat Tim Investigasi Notaris, dan Menggali potensi dukungan sarana prasarana bagi MPDN sebagai pilar pendukung utama dalam pelaksanaan tugas Tim Investigasi Notaris.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur,	Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Kelembagaan Majelis Pengawas Daerah Notaris / MPDN ini pesertanya adalah 18 Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris /

		Senin, tanggal 27 Mei 2019	MPDN. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan professionalisme dan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
		Ruang Teleconfere Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kamis, 19 September 2019	Terlaksananya kegiatan *Focus Group Discussion (*FGD) Pemanfaatan Media Elektronik Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Notaris dalam rangka meningkatkan professionalisme dan akuntabilitas pelaporan dan dapat memberikan pelayanan publik yang prima.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Selasa, 26 November 2019	Terlaksananya kegiatan *Focus Group Discussion (*FGD) Inventarisasi Permasalahan Notaris Untuk selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara lembaga - lembaga pembinaan dan pengawasan notaris di Jawa Timur dan Penerapan sanksi yang tegas bagi notaris yang telah jelas-jelas melanggar jabatan notaris, kode etik notaris dan notaris yang telah dikenai sanksi pidana.
		Hotel Ketapang, Banyuwangi, Senin s/d Rabu, 2 s/d 4 Desember 2014	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Pelaksanaan Investigasi Notaris. Evaluasi terhadap target kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 khususnya dalam hal investigasi Notaris. Diperlukannya sinergitas antar divisi beserta Unit Pelaksana Teknis khususnya Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk ikut memantau Notaris yang bermasalah dengan hukum pidana.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Senin, 16 Desember 2019	Terlaksananya kegiatan *Focus Group Discussion (* FGD) Evaluasi Pengawasan Notaris.
	k. Koordinasi dengan unit pusat	Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Senin, 04 Februari 2019	Koordinasi tentang Pengajuan Usulan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan MPWN dan MKN Jawa Timur.
		Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Jumat, 22 Februari 2019	Koordinasi terkait Revisi Anggaran DIPA AHU dan terkait Permintaan Penambahan Anggaran untuk kegiatan pada DIPA AHU.
		Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Kamis - Jumat, 28 s/d 29 Maret 2019	Konsultasi teknis dalam rangka optimalisasi pelayanan kewarganegaraan dengan Direktur Tata Negara, Administrasi Hukum Umum dan Konsultasi beberapa kendala Permasalahan Aplikasi SIKENOT dan Kenotariatan.
		Direktorat Jenderal AHU, Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta	Koordinasi terkait alokasi anggaran DIPA Administrasi Hukum Umum.

		Selatan, Jumat s/d Sabtu, 5-6 April 2019	
		Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Kamis s/d Jumat, 18-19 April 2019	Koordinasi dengan Unit Pusat terkait pelaksanaan Layanan Kewarganegaraan di Wilayah Jawa Timur.
		Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Senin s/d Selasa, 6-7 Mei 2019	Koordinasi dengan Unit Pusat terkait permasalahan Perdata (Badan Hukum, Yayasan dan Perkumpulan) di Wilayah Jawa Timur.
		Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Kamis s/d Jumat, 16 – 17 Mei 2019	Koordinasi pelaksanaan diskusi teknis hukum terkait penerapan peraturan baru pada layanan persetujuan mempekerjakan advokat asing di wilayah Jawa Timur.
		Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Jumat s/d Sabtu, 14 s/d 15 Juni 2019	Koordinasi dengan Unit Pusat terkait Sanksi Administrasi Notaris di Wilayah Jawa Timur pada Ketua MKN Pusat.
		Direktorat Jenderal AHU, Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Senin s/d Rabu, 1 s/d 3 Juli 2019	Terkoordinasinya Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019.
		Direktorat Perdata Direktorat Jenderal AHU, Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Rabu s/d Kamis, Tanggal 17 s/d 18 Juli 2019	Terkoordinasinya Pemetaan Notaris Bermasalah di Wilayah Jawa Timur.
		Direktorat Jenderal AHU, Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Kamis s/d Sabtu, 1 s/d 3 Agustus 2019	Terkoordinasinya tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
		Hotel ATRIA Gading Serpong, Tangerang, Banten, Rabu s/d Jumat , 21 s/d 23 Agustus 2019	Terkoordinasinya Kegiatan *transfer of knowledge* modul aplikasi AHU Online.
		Direktorat Jenderal AHU Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Senin s/d Selasa, 09 s/d 10 September 2019	Terkoordinasi dan terkonsultasikannya mengenai pelaksanaan Undang- Undang Jabatan Notaris pada Direktorat Kenotariatan.
		Direktorat Jenderal AHU	Terkoordinasi dan terkonsultasikannya mengenai penegasan dan permohonan status kewarganegaraan ke Direktorat Tata Negara.

		Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Jumat, 05-06 September 2019	
		Direktorat Jenderal AHU Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan dan Sekretariat Jenderal, Minggu s/d Rabu, 22 s/d 25 September 2019	Terlaksananya supervisi dan review RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA. 2020 termasuk DIPA Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah.
		Subdit Notariat, Direktorat Jenderal AHU, Jumat s/d Selasa, 05 s/d 08 Oktober 2019	Terkoordinasi dan Terkonsultasinya mengenai pemegang protokol notaris yang meninggal dunia.
		Hotel Horison Ultima, Bekasi, Selasa s/d Jumat, 08 s/d 11 Oktober 2019	Terlaksananya Workshop Asesor Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
		Jogja, Rabu s/d Jumat, 13 s/d 15 November 2019	Terkoordinasinya Mengenai Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan RI.
		Direktorat Jenderal AHU, Jl. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Kamis s/d Sabtu, 21 s/d 23 November 2019	Terkoordinasinya Mengenai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur.
		Bali, Kamis s/d Minggu, 21 s/d 24 November 2019	Terkoordinasinya terkait Aplikasi SMART e-bapenas.
		Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dan Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin s/d Rabu, 9 s/d 11 Desember 2019	Koordinasi dengan unit pusat terkait Penutupan Akun Notaris di Wilayah Jawa Timur dan Menghadiri acara peringatan Hari HAM Sedunia.
		Gedung Merdeka, Senin s/d Rabu, 9 s/d 11 Desember 2019	Terlaksananya kegiatan peringatan hari HAM sedunia ke 74 tahun 2019. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Merdeka ini merupakan puncak peringatan hari HAM sedunia yang mengambil tema " Pelayanan Publik yang Berkeadilan".
		Direktorat Jenderal AHU, Kamis s/d Sabtu, 12 s/d 14 Desember 2019	Terlaksananya Koordinasi dengan unit pusat terkait Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Notaris sebagai tindak lanjut kinerja Tim Investigasi Notaris. Pelaksana menjelaskan terkait permasalahan yang di alami Jawa Timur yang memang sangat

			mendesak untuk segera di sampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi.
	l. Pemantauan/evaluasi layanan AHU di wilayah	Jombang, Kamis-Jumat, 14-15 Februari 2019	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum Pada Notaris Kabupaten Jombang. Tim Pelaksana bertolak dari Kanwil Kemenkumham Jatim di Surabaya pukul 11.00 WIB dan tiba di Kantor Notaris Lucius Andik Rahmanto, SH.,M.Kn di Jalan Pahlawan No.48, Kepanjen. Kecamatan Jombang pada pukul 13.00 WIB kemudian Tim diterima oleh Notaris Lucius Andik Rahmanto.Dalam kegiatan ini permasalahan yang ditemukan adalah masalah NPWP ketika mendaftarkan PT. Pada system OSS tidak dapat lagi mengisi form NPWP PT dengan angka 000000, tetapi harus NPWP yang valid dan telah ada laporan SPT Pajaknya. Permasalahannya adalah Badan Hukum yang baru berdiri tidak mungkin sudah punya SPT karena bisnisnya saja belum dimulai. Disarankan agar untuk selanjutnya syarat tersebut diringankan menjadi NPWP Direktur Utama atau NPWP pemegang saham mayoritas.
		Bojonegoro, Selasa-Rabu, 5-6 Maret 2019	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU (Fidusia Online) di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Aston Bojonegoro dan Kantor Notaris dan PPAT Vedhasari Puspita, SH.,M.Kn. Diharapkan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU Fidusia Online yakni semakin membangun kesadaran dan pemahaman kepada notaris, perbankan, lembaga pembiayaan maupun retail dalam meningkatkan PNBP.
		Jombang, Rabu-Kamis, 13-14 Maret 2019	Monitoring dan Evaluasi Layanan AHU di Kabupaten Jombang. Bapak Suherman melaksanakan pengawasan pada Notaris Lucius Andik R, dalam kegiatan ini pelaksana langsung diterima oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam Monitoring dan Evaluasi terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pendaftaran Badan Hukum dari pihak notaris. Pelaksana juga menjelaskan bagaimana solusi dan mekanisme yang harus ditempuh, sekaligus menjelaskan untuk tetap melaporkan laporannya melalui aplikasi APN (Aplikasi Pelaporan Notaris) yang akan secara berkala dapat ditindak lanjuti setiap kendala yang ditemui.

		Ponorogo, Rabu-Kamis, 20-21 Maret 2019	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU berupa Badan Hukum pada Notaris di Kab. Ponorogo. Tim Pelaksana ditemui oleh Notaris Setya Budi yang sudah cukup lama menjadi Notaris. Dalam kegiatan ini diketahui bahwa minat warga ponorogo selain mengurus badan hukum juga mengurus perijinan tentang LSM.
		Probolinggo, Selasa-Rabu, 26-27 Maret 2019	Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Badan Hukum di Probolinggo. Tim Pelaksana berangkat dari Kanwil Jatim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 dan tiba ditempat tujuan yakni sekitar pukul 11. 00 WIB. Tiba di Kantor Notaris yakni Rachmawati Utami, SH.,M.Kn yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 21 Kraksaan, Probolinggo, kurang lebih 14.00 WIB. Kedatangan Tim Pelaksana ditemui oleh Rachmawati Utami, SH.,M.Kn beserta staf pada kantor Notaris tersebut. Pada kegiatan ini dibahas mengenai pembentukan susunan keanggotaan notaris Kabupaten Probolinggo, Prosedur pemeriksaan terhadap notaris yang bermasalah, Ketidakpahaman notaris mengenai system SABH saat ini, Sistem OSS dimana banyak notaris yang masih belum paham karena system OSS masih baru.
		Kediri, Kamis-Jumat, 28-29 Maret 2019	Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Badan Hukum di Kediri. Tim Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Notaris Trisnawati yang merupakan notaris di Kota Kediri. Notaris Trisnawati masih banyak kendala di lapangan mengenai sistem OSS tersebut, antara lain data yang ada dalam OSS belum terintegrasi dengan sistem Ditjen AHU Online, ketika akan melakukan perubahan data badan hukum, Peralihan atas ijin yang berlaku setelah adanya sistem OSS masih tumpang tindih.
		Pamekasan, Senin s/d Selasa, 8-9 April 2019	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Pamekasan. Tim Pelaksana berangkat dari Kanwil Kemenkumham Jatim di Surabaya pukul 10.00 WIB dan sampai disana Tim Pelaksana bertemu dengan Notaris Dr. Firmansjah., SH., M.Hum, Notaris Kab. Pamekasan, untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Badan Hukum. Menurut Notaris Firmansjah masih banyak kendala dilapangan mengenai sistem OSS tersebut, antara lain ketika akan melakukan perubahan data badan hukum, sistem yang terbuka hanya pada perubahan tersebut.

			Apabila Notaris akan melakukan update data tidak bisa dilakukan bebarengan dengan perubahan data tersebut. Misalnya terdapat perubahan anggaran dasar perusahaan, sistem yang terbuka hanya mengenai perubahan tersebut. Padahal Notaris akan melakukan update KTP, hal tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus, peralihan atas izin yang masih berlaku setelah adanya sistem OSS masih tumpang tindih. Notaris Firmansjah berharap agar PTSP dapat berkoordinasi dengan Lembaga OSS atas permasalahan di lapangan.
		Banyuwangi, Kamis s/d Jumat, 23 s/d 24 Mei 2019	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Banyuwangi. Tim Pelaksana bertolak dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya pukul 08.30 WIB dan tiba di Kantor Notaris Rudi Mulyanto, SH, M.Kn di Banyuwangi pada pukul 15.00 WIB. Kemudian Tim Pelaksana diterima oleh Notaris Rudi Mulyanto, SH, M.Kn. Kemudian Tim Pelaksana menyampaikan beberapa hal terkait Pelayanan Pendaftaran Badan Hukum Yayasan oleh Notaris, mulai dari tata cara pendaftaran, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi hingga alurnya sampai badan hukum itu disahkan. Ketertiban tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua Notaris paham betul tentang Pendaftaran dan persyaratan mendirikan badan hukum yang notabenenya semua itu melalui Notaris serta dari situ kita bisa menilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pendaftaran Badan Hukum Yayasan oleh Notaris.
		Tulungagung, Kamis s/d Jumat, 13 s/d 14 Juni 2019	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Tulungagung. Bertempat di Kantor Notaris Sri Areni yang berkantor di Jalan Pahlawan 4,Kedungwaru, Kedung Indah, Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Diharapkan melalui monitoring dan Evaluasi (Monev) ini, akan meningkatkan tertib administratif dalam pelayanan badan hukum/yayasan di Kabupaten Tulungagung.
		Kota Malang, Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2019	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Kota Malang. Tim Pelaksana bertolak dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya pukul 12.00 WIB. dan tiba di Kantor Notaris Andre Yanuar., SH., M.Hum di JI. Letjend S. Parman No.58, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 pada pukul

			15.00 WIB. Kemudian Tim Pelaksana diterima oleh Notaris Andre Yanuar., SH., M.Hum., M.Kn. Dalam kegiatan ini diketahui bahwa permasalahan NPWP ketika mendaftarkan PT.
		Kab. Malang, Senin s/d Selasa, 19 s/d 20 Agustus 2019s/d 14 Juni 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Kab.Malang
		Kota Probolinggo, Senin s/d Selasa, 16-17 September 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Kota Probolinggo.
		Kota Lamongan, Senin s/d Selasa, 23 s/d 24 September 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Kota Lamongan.
		Kota Jember, Senin s/d Selasa, 30 September s/d 1Oktober 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum di Kota Jember.
		Kantor Notaris Nurul Yakin, SH (Notaris Kabupaten Banyuwangi) Rabu s/d Jumat, 27 s/d 29 November 2019	Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran Badan Hukum/Yayasan oleh Notaris di Kabupaten Banyuwangi.
		Banyuwangi, Senin s/d Rabu, Tanggal 2 s/d 4 Desember 2019	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU berupa Badan Hukum pada Kantor Notaris Rudy Mulyanto,SH.,M.Kn di Banyuwangi.
		Notaris Niken Rahayu, SH., M.Kn, Senin s/d Selasa, 16 s/d 17 Desember 2019	Random Sampling Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU berupa Badan Hukum/ Yayasan / SABU pada Notaris di Kab. Tulungagung yaitu di Notaris Niken Rahayu., SH., M.Kn.
		Notaris Lucius Andik., SH., M.Kn, Jumat s/d Sabtu , 20 s/d 21 Desember 2019	Monitoring Dan Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum/Yayasan/OSS di Kabupaten Jombang. menyampaikan bahwa pendaftaran Badan Hukum baik itu PT Yayasan serta perkumpulan, CV dan sebagainya sudah baik.
2.	Layanan MKNW, MPW, dan MPD notaris		
	a. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 10 Januari 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur . Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Sugiharto, SH.,MH, Bambang Prijambodo Penangsang, SH.,Benediktus Bosu, SH.,Veronika Ratna Handayani, SH., Sabrina Askandar Tjokroprawira, SH.,M.Kn, Margareta Dyanawati, SH.,Asriningtyas Asmoro, SH., Atika Ashiblie, SE., Lenny Herina Ong, SH selaku pemegang protokol Lilia Devi Indrawati, SH., G.Mochtar Rudy, SH., Ita Kristiana, SH.,M.Kn, Kukuh Muljo Rahardjo, SH.,Imawati

			Odang, SH., Hani Setyawati, SH., Setya Yuwono, SH.,M.Kn dan Dwi Rossulliati, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 24 Januari 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Natalia Christiana, SH.,M.Kn, Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH.,Dotty Joedowati, SH., Ranti Nursukma Handayani, SH., Suprawito, SH.,M.Kn, Villia Sandra Dewi, SH.,M.Kn selaku pemegang protokol notaris Veronika Ratna Handayani, SH (P2), Sri Ningtyas Asmoro, SH (P2) DAN Margaretha Dyanawati,SH (P2).
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 7 Februari 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Natalia Christiana, SH.,M.Kn (P2), Suprawito, SH.,M.Kn(P2), Astri Ningtyas Asmoro, SH (P2), Robby Kurniawan, SH..,M.Kn, Tri Susilo Wati, SH.,M.Kn, Ario Hardickdo, SH., Dedi Wijaya, SH.,M.Kn, Nanang Jaka Sulistya, SH., Atika Ashiblie, SH.,M.Kn dan Yuli Ekawati, SH.,M.Kn.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 21 Februari 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Suprawito, SH.,M.Kn(P2), Robby Kurniawan, SH..,M.Kn (P2), Tri Susilo Wati, SH.,M.Kn (P2), Ario Hardickdo, SH(P2)., Dedi Wijaya, SH.,M.Kn(P2), Yuli Ekawati, SH.,M.Kn (P2), Hadi Soetopo, SH.,M.Kn, Yuli Ekawati, SH.,M.Kn, Hengki Budi Priyanto Putro, SH.,Vonny Chandra, SE.,SH.,M.Hum selaku pemegang protokol notaris Justitia Soetandio, SH, Tri Susilowati, SH.,M.Kn., Ariyani, SH., Hj. R.Ay. Sri Hartini, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 14 Maret 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Hengki Budi Priyanto Putro, SH.(P2), Tri Susilowati, SH.,M.Kn.(P2), Ariyani, SH.(P2), Hj. R.Ay. Sri Hartini, SH(P2), Ekawati Santoso, SH., Asri Ningtyas Asmoro, SH, Wahyudi Suyanto, SH, Olivia Sherlyne Wiratno, SH., Tri Winarno, SH.,M.Kn, Ronald Aprianto Sugiharto, SH.,M.Kn, Jusuf Patrianto Tjahjono, SH.,MH., Sulasiyah Amini, SH., Agatha Henny A.SIPA,SH.,M.Kn, Devi Crisnawati, SH., Ria Dewanti, SH., Maya Hasanah, SH.,M.Kn, Badrus Saleh, SH.,Wibowo Ibo Sarwono, SH.,Ria Dewanti, SH., Lukas Haridjaja Gani, SH., Anis Sulistyorini, SH.,M.Kn, Dyah Nuswantari

			Ekapsari, SH.,M.Si., Tulis Widodo, SH.,M.Kn, Tantien Bintarti, SH., Dotty Joedowati, SH., Ranti Nursukma Handayani, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 21 Maret 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Hengki Budi Priyanto Putro, SH(P2), Tri Susilowati, SH.,M.Kn (P2), Ariyani, SH(P2)., Hj.R. Ay. Sri Hartini, SH (P2)., Evawati Santoso, SH,Astri Ningtyas Asmoro,SH., Wahyudi Suyanto, SH., Olivia Sherlyne Wiratno, SH., Triwinarno, SH.,M.Kn, Ronald Aprianto Sugiharto, SH.,M.Kn, Jusuf Patrianto Tjahjono,SH.,MH., Sulasiyah Amini, SH., Agatha Henny A.SIPA, SH.,M.Kn, Devi Crisnawati, SH., Ria Dewanti, SH., Maya Hasanah, SH.,M.Kn, Badrus Saleh, SH., Wibowo Ibo Sarwono., Ria Dewanti., SH., Lukas Haridjaja Gani., SH., Anis Sulistyorini, SH.,M.Kn., Dyah Nuswantari Ekapsari, SH.,M.Si., Tulus Widodo, SH.,M.Kn., Tantien Bintarti, SH., Dotty Joedowati, SH., Ranti Nursukma Handayani, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 4 April 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Susi Ekowati, S.Psi.,SH.,M.Kn.(P2), Bhinnoecke Eka Sari, SH.,M.Kn.(P2), Hadi Soetopo, SH.,M.Kn (P2)., Dedi Wijaya, SH.,M.Kn., Wachid Hasyim, SH., Maria Inviolata Trinaryati Ekwantini, SH.,Wahyudi Suyanto.,SH., Yuli Ekawati., SH.,M.Kn., Widya Dewi Krisdianawati.,SH.,M.Kn., Maria Monica Ira Koesvitasari, SH., Evawati Santoso, SH., Dyah Nuswantari Ekapsari., S.H., M.Si.,dan Julia Seloadji., SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 11 April 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Dedi Wijaya, SH.,M.Kn (P2)., Widya Dewi Krisdiana.,SH.,M.Kn(P2)., Maria Monica Ira Koesvitasari, SH (P2)., Evawati Santoso, SH(P2).,Dyah Nuswantari Ekapsari., SH.,M.Si.,(P2)., Julia Seloadji, SH (P2)., Sulasiyah Amini.,SH.,MH., Wimphry Suwignjo, SH dan Silvia Ulfa, SH.,M.Kn.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 25 April 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Sulasiyah Amini., SH., MH., Ermin Yuniastuti., SH., Anna Ekowati., SH.,M.Kn., Irawati Njoto, SH., Heryanto Tjhang, SH., Winarko., SH., Bintarto

			Triatmodjo., SH., Ariesca Dwi Aptasari., SH.,M.Kn., Fennizar Wulandari Siwi., SH.,M.Kn., Dyah Nuswantari., SH.,M.Si., Ngakan Made Suta., SH., MM., dan Iwan Saleh Irawan., SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 9 Mei 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Ermin Yuniastuti., SH (P2)., Anna Ekowati., SH., M.Kn(P2)., Heryanto Tjang., SH(P2).,Bintarto Triatmodjo., SH., Dyah Nuswantari., SH.,M.Si.,Edhi Susanto., SH.,MH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 23 Mei 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Ngakan Made Suta., SH.,MM., Iwan Saleh Irawan., SH., Sugiharto, SH.,MH., Wibowo Ibo Sarwono., SH.,Mufriadi Jazuli., SH., Sri Maryami., SH., Sugeng Prijadi., SH., selaku pemegang protokol notaris Sri Maryami., SH., Nurul Fitria., SH.,M.Kn., Tantien Bintarti., SH., Sujadi., SH., Diana Uchrowiyah., SH., M.Kn., Julia Seloadji., SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Rabu, 29 Mei 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Ngakan Made Suta., SH.,MM.,(P2)., Sugiharto, SH.,MH., Wibowo Ibo Sarwono., SH(P2)., Sujadi., SH.,(P2)., Sri Maryami., SH.,(P2)., Sugeng Prijadi., SH(P2)., dan Tulus Widodo., SH., M.Kn.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Undang – Undang, Kamis, 20 Juni 2019	RDK dalam rangka agenda sidang MKNW Jawa Timur. Pada sidang ini notaris yang dijadwalkan sidang adalah Sri Maryami., SH.(P2)., Tulus Widodo., SH., M.Kn.(P2)., Parwita Sari., SH.,M.Kn dan Eilien Vania Aletha., SH.,M.Kn.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Kamis, 4 Juli 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Bachtiar Hasan,SH., Daniel Ganda Wijaya, SH.,M.Hum.,Eny Wahyuni, Widatul Millah.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Kamis, 18 Juli 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Edhi Susanto, SH.,MH.,Felicia Imantaka, Kamiliah B.,SH.,Kamilah Bahasuan, SH.,Sugiharto, SH.,MH., Wahyudi Suyanto.,Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, Yuli Andriyani, SH.,Ariana Yanuartrizanti, SH., Ronald Juanda, Zahiran Bachmid, Denny Lerry Sinulaga, Rizky Putri Maharani, SH.,M.Kn.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Kamis, 1 Agustus 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Djusita Rosa Ulidda,Dyah Widhiawati, SH.,M.Kn, Dini

			Andriani, SH.,M.Kn, Ronald Aprianto S.,Andreas Albertus Andi P.,Eny Wahyuni, SH.,Natalia Christiana, Mohammad,SH.,MKn,Meira Astri, SH.,M.Kn, Slamet Soepratikno, Sri Wahyu Jatmikowati.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Kamis, 15 Agustus 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Erwin Kurniawan, SH.,MKn.,Lidya Elizabhet, SH.,M.Kn.,Noor Irawaty, SH.,M.Kn, Anita Anggawidjaja, SH., Dyah Nuswantary E, SH.,Ony Septi Pontuando, SH., Nurbaya Lintang, SH.,Benediktus Bosu, SH., Deni Wirawan, SH.,MKn., Parwita Sari, SH.,M.Kn., Ario Hardickdo,SH.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Rabu, 28 Agustus 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Eko Sunu Jatmiko, SH.,MKn., Sitaresmi Puspadewi Subianto, Anggraeni Sari Megawati, Eny Wahyuni, SH., G.Mochtar Rudy, SH., Ariesca Dwi Aptasari, Meira Astri, SH.,M.Kn, Sakinah Hasan Assegaf, Faried, SH., Saifuddin, SH.,Dini Andriani, SH.,MKn, Edhi Susanto, SH.,MH.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Kamis, 12 September 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Yuli Andriyani, SH., Roma Panjaitan, SH., Lenny Wibowo, SH.,M.Kn, Dr. Slamet Wahyudi, SH.,M.Kn.,Fatimah Zakkiyyah. Habib Adjie, SH.,M.Hum., Ariesca Dwi Aptasari, SH.,M.Kn.
		Ruang Rapat Perancang Perundang-Undangan, Kamis, 26 September 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Dedy Wijaya, SH.,M.Kn.,Fathur Rahman, SH., Herawati, SH., Philipus Kurnia Wijaya, SH.,M.Kn, Handjani Dewi Njoto, SH.,Edi Susanto, SH.,MH,Eko Ismanto, SH,Krisma Suyanto, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kamis, 10 Oktober 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Isy Karimah Syakir, SH.,M.Kn, Tri Sinta Krisaningrum, SH.,MKn, Abdul Mu'is Ikhsan, SH.,Sjam Suriaman, SH.,M.Kn, Dyah Nuswantari Ekapsari, SH.,M.Si, Wimphry Suwignjo, SH., Happy Herawati Chandra, SH., Christiana Inawati,SH.,Yuni Wigiarti, SH., Hilda, SH, Mufriadi Jazuli, SH.,Edhi Susanto, SH.,Devi Chrisnawati, SH.,Vivi Soraya, SH., Fachria, SH.,Dharma Budiman, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Selasa, 15 Oktober 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Anita Anggawidjaja, SH.,Natalia Christiana, SH.,M.Kn, Olivia Sherline Wiratno, SH., Benediktus Bosu, SH.,Meira Astri, SH.,M.Kn.

		Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Selasa, 29 Oktober 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Dyah Nuswantari, Stefanus Aris Riyanto, SH., Tatang Taryana, SH., Sartono, SH., Bambang Winarto, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kamis, 28 November 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Wahayu Krisma Suyanto, SH.,M.Kn.,Sugiharto, SH.,MH,R.A. Sri Hartini, SH, Wahyudi Suyanto, SH, Soejono, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kamis, 12 Desember 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Drs. Subiyanto, SH.,MH.,MKn, Tri Susilowati, SH.,MKn, Eilien Vania Eletha, SH.,MKn, N. Made Suta, SH.,MM,Achmad Haris Hidayat, SH.,MKn, Sugiharto, SH.,MH, Devi Chrisnawati, SH., Lutfi Afandi, SH.,MKn, Maria Tjandra, SH.,Tri Winarno, SH.,MKn, Fathur Rahman, SH, Asriningtyas, SH.
		Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kamis, 19 Desember 2019	Terlaksananya sidang MKNW Jawa Timur dengan agenda notaris yang diperiksa Bintarto Triatmodjo, SH, Maria Baroroh, SH.,Ariesca Dwi Apsari, SH.,MKn, Dr. Hadi Soetopo, SH.,MH.,Irianto Tanawidjaja, SH., Wina Ustriani, Wahayu Krisma S, Choiriyah,SH., Alfin Yahya, SH., Tulus Widodo, SH.,MKn, Liem Sien Hwa, SH., Tri Susilowati, SH.,MKn., Drs. Hari Supriono, SH.,MKn, Dwiana Juliastuti, SH., Eni Wahyuni, SH.
	b. Tim Evaluasi dan Investigasi Notaris	Ruang Teleconference, Jumat, 22 Maret 2019	Terlaksananya kegiatan Tim Evaluasi dan Investigasi Notaris yaitu terhadap Notaris Ranti (Notaris Surabaya) dimana pertama pelapor merasa tidak pernah menerima uang dari perjanjian jual beli yang dilakukan , kedua karena ada akta yang terbit pelapor merasa dirugikan terhadap akta tersebut.
	c. Majelis Pengawas Wilayah Notaris	Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Rabu, 9 Januari 2019	Peserta Rapat adalah Majelis Pemeriksa, Sekretaris Majelis Pemeriksa. Agenda sidang adalah Pemeriksaan Notaris Hadi Soetopo, S.H., (Notaris Mojokerto) dan Notaris H. Teddy Armanto, SH., M.Kn (Notaris Pasuruan).
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis, 31 Januari 2019	Peserta Rapat adalah Majelis Pemeriksa, Sekretaris Majelis Pemeriksa.Agenda sidang adalah Pemeriksaan Notaris H.Teddy Armanto, SH.,M.Kn dan Notaris Vedhasari Puspita, SH.,M.Kn.
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu , 10 April 2019	Sidang ini diagendakan memeriksa Notaris terperiksa sebanyak 2 (dua) orang Notaris beserta pelapor. Rapat dimulai pukul 17.00 WIB dengan majelis pemeriksa Macmud Fauzi, SH., dan Hajerati didampingi Mustiqo Vitra A,

			Jiwa Mulya Heri dan Kadek Yeni. Terlaksananya pemeriksaan Notaris Hadi Soetopo, SH (Notaris Mojokerto), dan Notaris M.Adi Firmanu, SH. (Notaris Mojokerto).
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu , 8 Mei 2019	Peserta Rapat adalah Majelis Pemeriksa, Sekretaris Majelis Pemeriksa dan Para Notaris Terperiksa. Terlaksananya Pemeriksaan Notaris Hadi Soetopo, SH. (Notaris Mojokerto) dan Notaris M.Adi Firmanu,SH. (Notaris Mojokerto) dan Notaris H. Mahyuni Sofyan Hadi, SH.(Notaris Jombang).
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu , 12 Juni 2019	Peserta Rapat adalah Majelis Pemeriksa, Sekretaris Majelis Pemeriksa. Terlaksananya pembahasan tindak lanjut pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat Notaris Sugeng Prijadi, SH.,M.Kn (Notaris Sidoarjo), Notaris Ranti Oktasari,SH.,M.Kn (Notaris Gresik), Notaris H. Teddy Armanto,SH.,M.Kn (Notaris Kabupaten Pasuruan), dan Notaris Vedhasari Puspita, SH.(Notaris Kabupaten Bojonegoro).
		Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu , 26 Juni 2019	Terlaksananya pembahasan mengenai pedoman teknis/ SOP MPDN dan MPWN serta tindak lanjut keputusan atas laporan masyarakat.
		MPDN Jombang, Kamis, 14 Februari 2019	Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan MPDN Jombang. Tim Pelaksana bertolak dari Kanwil Kemenkumham Jatim pukul 11.00 WIB dan Tiba Pada Pukul 13.00 WIB. Tim Pelaksana menyampaikan tata cara pemeriksaan Notaris, baik pemeriksaan protokol rutin maupun pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik Notaris. Selanjutnya Tim juga melaksanakan pembekalan terkait tata cara persuratan, tata cara pelaporan pertanggungjawaban keuangan serta tata cara monitoring evaluasi Notaris melalui sistem online.Pembekalan terhadap Anggota MPDN baru, tata cara pemeriksaan Notaris, baik protokol rutin maupun pemeriksaan Laporan Pelanggaran Kode Etik Notaris.
		Kantor UNTAG Banyuwangi & Hotel Ikhtiar Surya, Jumat - Sabtu, 15 -16 Februari 2019	Pembinaan dan Pengawasan terhadap MPDN Banyuwangi. Pembinaan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pengda INI Kabupaten Banyuwangi yang juga menyelenggarakan kegiatan upgrading dan Sosialisasi MPDN Banyuwangi, dimana pada acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Notaris yang berada di wilayah kerja Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo. Dari kegiatan ini Anggota MPDN telah memahami bagaimana tata cara

			pemeriksaan kepada Notaris dan seluruh notaris yang hadir antusiasmenerima pengarahan dari MPD dan MPW sebagai bekal mereka dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris.
		MPDN Malang, Kamis-Jumat, 21 - 22 Februari 2019	Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan MPDN Kota Malang.Tim Pelaksana Bertolak dari Kanwil Kemenkumham Jatim Pada Pukul 09.00 WIB dan Tiba Pukul 11.00 WIB. Kemudian Tim Pelaksana diterima oleh Ketua MPDN Kota Malang di kantor MPDN Kota Malang yang berlokasi di Kampus Universitas Brawijaya Gedung C Lantai 4 Jl. Veteran Malang diikuti oleh seluruh ketua serta anggota MPDN Kota Malang. Pembekalan / Penguatan terkait Tugas Pokok dan Fungsi MPD Notaris Kota Malang.
		MPDN Ponorogo, Rabu, 20 Maret 2019	Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan MPDN Kota Ponorogo. Tim pelaksana bertolak dari Kanwil Kemenkumham Jatim pada pukul 09.00 WIB menuju Kabupaten Ponorogo dan tiba di Kantor Sekretariat MPDN Ponorogo pada pukul 13.30 WIB. Tim pelaksana diterima oleh Ketua MPD Ponorogo beserta sekretaris dan seluruh anggota MPDN Ponorogo. Tim Pelaksana melakukan pembekalan kepada anggota MPD yang baru dilantik, Tim juga menyampaikan mekanisme pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tugas MPD dan Berita Acara Sumpah Anggota MPD Ponorogo Periode 2018 – 2021.
		MPDN Kediri, Kamis - Jumat, 28-29 Maret 2019	Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan MPDN Kota Kediri. Pembinaan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pengda INI Kediri yang juga menyelenggarakan kegiatan Pembinaan, Upgrading dan Refreshing Course bagi Notaris Kabupaten Kediri. Tim Pelaksana didampingi oleh wakil ketua MPWN Jatim, Machmud Fauzi, menyampaikan bahwa notaris harus dapat bekerja professional sesuai ketentuan dalam UUJN, Mengingat dalam tahun 2018 sudah ada 308 permohonan pemeriksaan notaris oleh MKN atas permintaan aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya, sedangkan hingga bulan maret 2019 sudah 45 surat yang diajukan kepada MKN.Dari kegiatan ini MPD Tulungagung akan segera mengadakan musyawarah untuk menentukan kepengurusan MPD TA 2019 - 2021.

		MPDN Pamekasan, Senin s/d Selasa, 8-9 April 2019	Monitoring dan Evaluasi MPW ke MPDN Pamekasan di Kabupaten Pamekasan. Tim Pelaksana bertolak dari Kanwil Kemenkumham Jatim di Surabaya pukul 10.00 WIB dan tiba di Kantor MPDN Pamekasan pada pukul 14.00 WIB dan kemudian Tim Pelaksana diterima oleh Ketua MPDN Pamekasan dengan beberapa anggota MPD Lainnya. Tim Pelaksana menyampaikan beberapa hal terkait pemeriksaan notaris khususnya di wilayah kabupaten pamekasan yang MPDN nya tergolong baru dibentuk dan baru berjalan selama 3 bulan terakhir. Tim Pelaksana juga menjelaskan tentang peranan Tim Investigasi Notaris yang terdiri dari para pimti di Kanwil Kemenkumham Jatim dan menyampaikan agar tertib dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan administrasi tersebut kepada Kantor Wilayah.
		MPDN Madiun, Selasa s/d Rabu, 23 s/d 24 April 2019	Monitoring dan Evaluasi MPW ke MPDN Madiun di Kabupaten Madiun. Pembinaan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pengda INI Madiun yang juga menyelenggarakan kegiatan Pembinaan, Ugrading, dan Refreshing Course bagi Notaris Kota Madiun, dimana pada acara tersebut dihadiri oleh seluruh Notaris yang berada di wilayah Kerja Kab/ Kota Madiun dan Kab. Ngawi. Pembinaan dan Pengarahan secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas MPD diberikan kepada Pengurus dan Anggota MPDN Madiun setelah sesi upgrading.
		Lapas Kelas IIB Tulungagung, Kamis s/d Jumat, 13 s/d 14 Juni 2019	Monitoring dan Evaluasi MPW ke MPDN Tulungagung di Kabupaten Tulungagung. Tim beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung Bapak Erry. Setelah berbincang tepat pukul 13.00 WIB, Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan untuk MPDN Kab.Tulungagung dilaksanakan di Aula Lapas Kelas IIB Tulungagung, dalam pembahasannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan dan selalu mengingatkan untuk menjaga integritas dan kualitas notaris serta mengimplementasikan Undang- Undang maka dibentuklah MPD disetiap Kabupaten dan Kota.
		MPDN Jember, Senin s/d Selasa, 24-25 Juni 2019	Monitoring dan Evaluasi MPDN Jember. Tim Pelaksana bertolak dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur di Surabaya pada

			pukul 08.30 WIB dan Tiba di Sekretariat MPDN Jember pada Pukul 08.30 WIB dan tiba di sekretariat MPDN Jember Pada Pukul 13.00 WIB. Tim diterima oleh Ketua MPDN Jember beserta beberapa anggotanya. Tim Pelaksana menyampaikan tata cara pemeriksaan Notaris, baik pemeriksaan protokol rutin maupun pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik Notaris. Selanjutnya Tim juga melaksanakan pembekalan terkait tata cara persuratan, himbauan untuk penyerapan anggaran secara maksimal, tata cara pelaporan pertanggungjawaban keuangan serta tata cara monitoring evaluasi Notaris melalui system online.
		Kota Pasuruan, Rabu, 10 Juli 2019	Terlaksananya pengawasan dan koordinasi dengan sekretariat MPDN Pasuruan.
		Kab. Malang, Senin s/d Selasa, 19 s/d 20 Agustus 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi MPD Kab.Malang.
		Kab. Gresik, Senin, 09 September 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi MPD Kab. Gresik.
		Kota Probolinggo, Senin s/d Selasa, 16-17 September 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi MPD Kota Probolinggo.
		Lamongan, Selasa, 23 s/d 24 September 2019	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi MPD Lamongan.
		Sekretariat MPDN Kab. Mojokerto, Jumat, 11 Oktober 2019	Terlaksananya Pengawasan dan Koordinasi dengan Sekretariat MPDN Kab. Mojokerto.
		Sekretariat MPDN Kota Surabaya, Senin, 9 Desember 2019	Terlaksananya Pengawasan dan Koordinasi dengan Sekretariat MPDN Kota Surabaya.
	d. Majelis Pengawas Daerah Notaris	Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019	Koordinasi Kesekretariatan 16 MPDN, Monitoring MPDN Ke Notaris sesuai dengan wilayahnya, Honorarium 16 MPDN dan Operasional 16 MPDN (2 MPDN Belum Aktif).
3.	Dukungan Layanan AHU di wilayah		
	a. Publikasi Layanan AHU	Kota Malang, Rabu s/d Jumat, 17 s/d 19 Juli 2019	Terlaksananya publikasi layanan AHU melalui kegiatan Pameran Malang City Expo 2019.
		Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sabtu, 26 Oktober 2019	Terlaksananya publikasi layanan AHU yaitu terkait AHU Online.
	b. Penyediaan peralatan dan fasilitas penunjang	• Toyota Alphard tanggal kontrak 10 Januari 2019 • Toyota Altis tanggal kontrak 17 Januari 2019	Sewa Kendaraan Pelayanan Jasa Hukum Roda 4 sejumlah 2 Unit yaitu Toyota Expander , Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Roda 4 2 Unit yaitu Toyota Alphard dan Toyota Altis Selain itu telah dilaksanakan kerjasama untuk tempat Penyimpanan Protokol Notaris, Telah

	pelayanan jasa hukum di wilayah	• Toyota Expander tanggal kontrak 21 Januari 2019 • Digitalisasi Arsip tanggal kontrak 01 April 2019 • Sewa gudang Protokol Notaris tanggal kontrak 01 Maret 2019	dilakukan sewa gudang Fidusia periode tahun 2019, sudah dilaksanakan langganan bandwith dan server tiap bulannya.

A. Capaian Kinerja

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum selama periode tahun anggaran 2019 dan sesuai rekapitulasi pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan dan target kinerja telah terpenuhi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum dibidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	12 Laporan	12 Laporan	100%

B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran Program Administrasi Hukum Umum selama kurun periode tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum Pada Kantor Wilayah			
001	Layanan Fidusia	132.084.000	124.410.898	94,19%
002	Layanan Kewarganegaraan	68.719.000	63.790.998	92,83%
003	Layanan Kenotariatan	75.496.000	67.282.600	89,12%
004	Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya	646.856.000	644.143.000	99,58%
005	Pemantauan Dan Koordinasi	356.700.000	317.492.301	89,01%
5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	1.174.100.000	1.060.826.822	90,35%
5251.003	Dukungan Layanan AHU Di Wilayah	1.046.045.000	1.031.647.808	98,62%
JUMLAH		**3.500.000.000**	**3.309.594.427**	**94,56%**

Dan data Disbursement Plan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TAHUN 2019	RENCANA REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE RENCANA REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	DEVIASI (%)
Triwulan I	313.113.000	8,95%	487.134.500	13,92%	4,97%
Triwulan II	1.263.405.000	36,10%	958.520.590	27,39%	-8,71%
Triwulan III	947.510.000	27,07%	1.031.333.558	29,47%	2,39%
Triwulan IV	975.972.000	27,88%	832.605.779	23,79%	-4,10%
TOTAL PAGU ANGGARAN	**3.500.000.000**	**100,00%**	**3.309.594.427**	**94,56%**	**-5,44%**

C. Analisa

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Administrasi Hukum Umum diatas menunjukkan bahwa prosentase capaian kinerja mencapai 100% baik dari layanan jasa hukum oleh Kanwil maupun pelaksanaan layanan Balai Harta Peninggalan Surabaya, kedua Satuan Kerja ini telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dan sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Program AHU tahun 2019. Namun jika dilihat dari realisasi anggaran berdasarkan laporan dari aplikasi SPAN dan rencana *disbursement plan* menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal. Secara total penyerapan anggaran di tahun 2019 menunjukkan angka 94,56% atau terdapat deviasi negatif sebesar 5,44% dari target 100% yang direncanakan. Hal ini dinilai wajar mengingat seluruh kegiatan dan target capaian kinerja telah tercapai 100%.

3.4.2 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selama periode tahun anggaran 2019:

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1.	Penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	a. Penyelesaian permohonan HKI sesuai dengan peraturan	1. Kantor Wilayah Januari s/d Desember 2019 (1 Tahun)	Melaksanakan pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui operasional Loket Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
		2. Jakarta , 18-19 Maret 2019	Melaksanakan Koordinasi dengan DJKI terkait Pelaksanaan Tarja B 03 pada Kantor Wilayah
		3. Jakarta, 20-21 September 2019	Melaksanakan Koordinasi dengan DJKI terkait terkait penyerahan sertifikat IG Kopi Robusta Pasuruan

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
		4. Jakarta, 24-26 September 2019	Melaksanakan Koordinasi dengan DJKI terkait Pelaksanaan Supervisi RKA/KL Pagu Alokasi TA 2020
	b. Promosi dan diseminasi kekayaan intelektual	1. Pasuruan, 01 Agustus 2019	Pendampingan Pemeriksaan Subtantif Kopi Robusta Pasuruan
		2. Pasuruan, 06 Oktober 2019	Pendampingan Pendaftaran IG Kopi Arabika Pasuruan
		3. Surabaya, 09 Oktober 2019	Talkshow Tata Cara Pendaftaran Merek Bagi UKM
		4. Surabaya 26 Oktober 2019	Talkshow Perlindungan Produk Unggulan Karya WBP dengan Pendaftaran KI
	c. Penyediaan data kekayaan intelektual komunal	1. Bondowoso, 12 Maret 2019	Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Wilayah Jawa Timur
2.	Penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil		
	a. Pencegahan pelanggaran HKI di wilayah	1. Malang, 11-12 Maret 2019	Pengamatan Wilayah Potensi Pelanggaran KI (Pemalsuan Merek Produk Clothing)
		2. Bangkalan, 24 Juni 2019	Pengamatan Wilayah Potensi Pelanggaran KI terhadap merek “Bebek Songkem”
		3. Tulungagung, 09 Mei 2019	Seminar Pencegahan Pelanggaran KI bagi Pelaku Seni dan Budaya
	b. Pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	1.Pamekasan, 14 Juni 2019	Penyelidikan Kasus Pemalsuan Merek Rokok “SP”
		2.Probolinggo, 27 Nopember 2019	Penyelidikan Kasus Sengketa Merek “LIRA”
		3.Bangkalan, 22 Nopember 2019	Penyelesaian Sengketa Merek “Tera’ Bulan “
	c. Pengawasan indikasi geografis terdaftar	1.Sidoarjo, 3 September 2019	Pengawasan Indikasi Geografis Bandeng Asap Sidoarjo

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama periode tahun anggaran 2019, maka diperoleh data capaian kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Terciptanya Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Jawa Timur yang Berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Jawa Timur	80%	197.8%	247.25%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
	Presentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Jawa Timur	80%	133.3%	166.63%
	Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Jawa Timur	80%	100%	125%
	Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Jawa Timur	80%	100%	125%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Terciptanya Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Jawa Timur yang Berkualitas baik sekali	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Jawa Timur	1.000 Pemohon	1.978 Pemohon	197,8%
	Jumlah penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Jawa Timur	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133,3%
	Jumlah penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Jawa Timur	10 Kasus	10 Kasus	100%
	Jumlah database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Jawa Timur	1 Database	1 Database	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN
1.	Terciptanya Layanan Kekayaan	Persentase penyelesaian penerimaan	100 %	197.8%	Presentase penyelesaian dari jumlah permohonan KI yang diterima adalah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN
	Intelektual di Kantor Wilayah Jawa Timur yang Berkualitas baik sekali	permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			sebesar 197.8% (1978 Permohonan)
		Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Jawa Timur	1.000 Pemohon	1978 Permoho-nan	1978 Permohonan dengan rincian sebagai berikut: 1. Merk 1770 Permohonan 2. Paten 9 Permohonan 3. Desain Industri 31 Permohonan 4. Cipta 268 Permohonan
		Jumlah penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Jawa Timur	3 Kegiatan	4 Kegiatan	**1. Jenis Kegiatan**: Pendampingan Pemeriksaan Subtantif Kopi Robusta Pasuruan **Tempat**: Kabupaten Pasuruan **Waktu pelaksanaan**: Pasuruan, 01 Agustus 2019 **Maksud dan Tujuan:** Tersusunnya Dokumen Deskripsi IG Kopi Robusta Pasuruan dengan sempurna **Outcome:** Diterimanya Sertifikat IG Kopi Robusta Pasuruan **2. Jenis Kegiatan**: Pendampingan Pendaftaran IG Kopi Arabika Pasuruan **Tempat**: Kabupaten Pasuruan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN
					Waktu pelaksanaan: 06 Oktober 2019 **Maksud dan Tujuan:** Tersampaikannya tatacara Pendaftaran IG kepada MPIG Kopi Arabika Pasuruan **Outcome:** Tersusunnya dokumen/berkas pendaftaran IG Kopi Arabika Pasuruan **3. Jenis Kegiatan**: Talkshow Tata Cara Pendaftaran Merek Bagi Ukm **Tempat**: Grand City Convention and Exhibition Hall **Waktu pelaksanaan**: 9 Oktober 2019 **Maksud dan Tujuan:** Tersampaikannya informasi tatacara pendaftaran merek bagi UKM di Surabaya **Outcome:** Meningkatnya pendaftaran merek dari UKM di Surabaya dan Sekitarnya **4. Jenis Kegiatan**: Talkshow Perlindungan Produk Unggulan Karya WBP dengan Pendaftaran Kekayaan Intelektual **Tempat**: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur **Waktu pelaksanaan**: 26 Oktober 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN
					Maksud dan Tujuan: Tersampaikannya informasi tatacara pendaftaran KI bagi Produk Hasil WBP **Outcome:** Meningkatnya pendaftaran KI produk hasil WBP di Jawa Timur
		Jumlah penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Jawa Timur	10 Kasus	10 Kasus	**1.** Pengawasan Pelanggaran Ki Di Kota Malang (Pemalsuan Merek Produk Clothing "Planet Surf") **2.** Pengawasan Pelanggaran Ki Di Kabupaten Bangkalan (Pengamatan Wilayah Potensi Pelanggaran KI terhadap merek "Bebek Songkem" di Kabupaten Bangkalan) **3.** Pengawasan Dugaan Pelanggaran Merek Lira (Penyelidikan Kasus Sengketa Merek "LIRA" di Kota Probolinggo) **4.** Penyelesaian Pengaduan Merek SP86 (Penyelidikan Kasus Pemalsuan Merek Rokok "SP86") **5.** Pengawasan Pelanggaran KI Di Kabupaten Bangkalan (Pengamatan Wilayah Potensi Pelanggaran KI terhadap merek "Bebek Songkem") **6.** Pencegahan Pelanggaran KI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN
					Kabupaten Tulungagung (Seminar Pencegahan Pelanggaran KI bagi Pelaku Seni dan Budaya) **7.** Pengawasan Indikasi Geografis (Pengawasan Indikasi Geografis Bandeng Asap Sidoarjo) **8.** Permohonan Bantuan Ahli Kasus Dugaan Pelanggaran KI (Surat Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Nomor : B/10594/X/HUK.12.25/ 2019/Ditreskrimsus, Tanggal : 8 Oktober 2019, Perihal : Permohonan Bantuan Ahli) **9.** Permohonan Bantuan Ahli Kasus Dugaan Pelanggaran KI (Surat Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Nomor : B/10595/X/HUK.12.25/ 2019/Ditreskrimsus Perihal : Permohonan Bantuan Ahli Tanggal : 8 Oktober 2019) **10.** Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri (Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Atas Rak Air Minum Kemasan dan Toples)
		Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor	1 Data KI Komunal	1 Data KI Komunal	**Jenis Kegiatan** : Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal **Tempat**: Kabupaten Bondowoso

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN
		Wilayah Jawa Timur			**Waktu pelaksanaan**: 12 Maret 2019 **Maksud dan Tujuan:** Adanya inventarisasi potensi KIK di Jawa Timur **Outcome:** Input Data Inventarisasi KI di database KI Komunal Indonesia
		Jumlah Indikasi Geografis yang Diawasi	1 Indikasi Geografis	1 Indikasi Geografis	**Jenis Kegiatan**: Pengawasan Indikasi Geografis Bandeng Asap Sidoarjo **Tempat**: Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sidoarjo **Waktu pelaksanaan:** 3 September 2019 **Maksud dan Tujuan:** Terlaksananya pengawasan Indikasi Geografis Bandeng Asap Sidoarjo **Outcome:** Terlaksananya IG Bandeng Asap Sidoarjo sesuai dengan buku deskripsi IG

REKAPITULASI PENYELESAIAN PERMOHONAN KI TA. 2019

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON	PERMOHONAN YG TERSELESAIKAN
1.	Merk	1.770 Permohonan	1.770 Permohonan
2.	Paten	9 Permohonan	9 Permohonan
3.	Desain Industri	31 Permohonan	31 Permohonan
4.	Cipta	268 Permohonan	268 Permohonan
TOTAL PEMOHON		1.978 Permohonan	1.978 Permohonan

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN PELANGGARAN KI TA. 2019

NO.	JENIS KASUS PENGADUAN	URAIAN
1.	Pengawasan Pelanggaran KI Di Kota Malang	Pemalsuan Merek Produk Clothing “Planet Surf”
2.	Pengawasan Pelanggaran KI Di Kabupaten Bangkalan	Pengamatan Wilayah Potensi Pelanggaran KI terhadap merek “Bebek Songkem” di Kabupaten Bangkalan
3.	Pengawasan Dugaan Pelanggaran Merek Lira	Penyelidikan Kasus Sengketa Merek “LIRA” di Kota Probolinggo

NO.	JENIS KASUS PENGADUAN	URAIAN
4.	Penyelesaian Pengaduan Merek SP86	Penyelidikan Kasus Pemalsuan Merek Rokok "SP86"
5.	Pengawasan Pelanggaran KI Di Kabupaten Bangkalan	Pengamatan Wilayah Potensi Pelanggaran KI terhadap merek "Bebek Songkem"
6.	Pencegahan Pelanggaran KI Kabupaten Tulungagung	Seminar Pencegahan Pelanggaran KI bagi Pelaku Seni dan Budaya
7.	Pengawasan Indikasi Geografis	Pengawasan Indikasi Geografis Bandeng Asap Sidoarjo
8.	Permohonan Bantuan Ahli Kasus Dugaan Pelanggaran KI	Surat Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Nomor : B/10594/X/HUK.12.25/2019/Ditreskrimsus Tanggal : 8 Oktober 2019 Perihal : Permohonan Bantuan Ahli
9.	Permohonan Bantuan Ahli Kasus Dugaan Pelanggaran KI	Surat Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Nomor : B/10595/X/HUK.12.25/2019/Ditreskrimsus Perihal : Permohonan Bantuan Ahli Tanggal : 8 Oktober 2019
10.	Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri	Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Atas Rak Air Minum Kemasan dan Toples

B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual selama kurun periode tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
5253.001	Layanan HKI di Daerah			
051	Penyelesaian Permohonan HKI Sesuai dengan Peraturan	46.590.000	44.199.000	94,87%
052	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	111.193.000	110.000.600	98,93%
053	Penyediaan Data Kekayaan Intelektual Komunal	11.544.000	11.029.000	95,54%
5253.002	Penegakan Hukum di Daerah			
051	Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah	89.984.000	89.425.290	99,38%
052	Pengaduan Pelanggaran HKI di Kanwil	14.123.000	12.623.000	89,38%
053	Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar	21.637.000	19.302.194	89,21%
JUMLAH		**295.071.000**	**286.579.084**	**97,12%**

Data Disbursement Plant Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

TAHUN 2019	RENCANA REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE RENCANA REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	DEVIASI (%)
Triwulan I	4.614.000	1,56%	13.970.290	4,73%	3,17%
Triwulan II	248.531.000	84,23%	104.112.700	35,28%	-48,94%
Triwulan III	19.652.000	6,66%	49.580.594	16,80%	10,14%
Triwulan IV	22.274.000	7,55%	118.915.500	40,30%	32,75%
TOTAL PAGU ANGGARAN	**295.071.000**	**100,00%**	**286.579.084**	**97,12%**	**-2,88%**

C. Analisa

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual memiliki empat indikator kinerja yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun. Pada periode tahun anggaran 2019 telah menerima 1978 permohonan kekayaan intelektual dan berhasil menyelesaikan 1770 permohonan terkait merk, 9 permohonan terkait paten, 31 permohonan terkait desain industry dan 268 permohonan terkait cipta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual telah melaksanakan kegiatan dengan baik karena memenuhi indikator kinerja mencapai 1978 jumlah pemohon kekayaan intelektual yang telah diselesaikan melebihi dari target 1.000 pemohon yang ditetapkan. Kemudian untuk memenuhi indikator penyelenggaraan promosi dan diseminasi, Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual telah menyelenggarakan 4 kegiatan berupa pendampingan pendaftaran Indikasi Geografis dan *talk show* terkait layanan KI. Sedangkan indikator penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil, telah terselesaikan 10 kasus artinya 100% target telah terpenuhi. Indikator kinerja kegiatan lainnya, yaitu database kekayaan intelektual komunal yang telah dilaksanakan dan dihasilkan 1 database, dengan melakukan inventarisasi potensi KIK di Jawa Timur.

Apabila dilihat dari segi keuangan, pada akhir periode tahun anggaran 2019 terdapat devisiasi negatif yaitu sebesar 2,95%. Meskipun demikian, seluruh kegiatan pada Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan dan mampu memenuhi dan bahkan melampaui target kinerja pada 2 indikator yang telah ditetapkan.

3.4.3 Program Pembentukan Hukum

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menjalankan Program Pembentukan Hukum dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja yang dibuat antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selama periode tahun anggaran 2019:

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
1	Rancanagan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan Permohonan		
	a. Melakukan Fasilitasi Harmonisasi perancangan peraturan daerah	Kota Malang, 17 Januari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Susunan Perangkat Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Tuban, 21 Januari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Tuban, 21 Januari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Tentang Ijin Lingkungan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 24 Januari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 25 Januari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Malang, 30 Januari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Kelas Jabatan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lumajang, 7 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lumajang Tentang Koperasi dan Usaha Mikro *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lumajang, 7 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang terkait tentang Kabupaten Lumajang Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lumajang, 7 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lumajang Tentang Hari Jadi Lumajan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lumajang, 7 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lumajang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 8 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Walikota Malang Tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujuan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 8 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada DPRD Kota Malang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 11 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Kepemudaan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 12 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bersumber Dana Alokasi Umum Tambahan TA. 2019. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 14 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Kepemudaan (lanjutan). *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 14 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang 4 (empat) Pencabutan Peraturan Daerah Kota Malang. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 14 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 14 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Daerah Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Gresik, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Gresik Tentang Insentif Penanaman Modal. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Gresik, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Gresik Tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Gresik, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Gresik Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Pendidik. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Gresik, 15 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Gresik Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 18 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lanjutan). *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 25 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada kota Malang Tentang Perubahan keempat Tambahan Penghasilan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 27 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada kota Malang Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 28 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada kota Malang Tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Batu, 1 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Batu Tentang Pajak Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Batu, 1 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Batu Tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Batu, 1 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Batu Tentang Barang Milik Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 1 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Malang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa Perumda Tirta Kanjuruhan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo, 4 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 5 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Kepemudaan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 5 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 5 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 5 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Pendirian PT BPR Mina Usaha. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 6 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 6 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Walikota Malang Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 6 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Malang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 8 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 13 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lanjutan). *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 14 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Grati . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 14 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonorejo . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 15 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Gempol .

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 15 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pandaan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 18 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Malang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 19-20 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Malang Tentang Penyusunan Ranperda tunjangan Kinerja PNS Kab. Malang. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Trenggalek, 25 Maret 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Trenggalek Tentang Tentang Perumda Aneka Usaha dan PTBPR Jwalita *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 4 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Pemafaatan Pendapatan Fungsional pada Puskesmas Kota Malang *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Malang, 4 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Puskesmas Kota Malang *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 9 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 9 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 11 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 16 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Standar Biaya Umum *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 16 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Penyelengaraan Pendidikan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Warisan Budaya dan Cagar Budaya *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Perusahaan Umum Daerah PDAM *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Bangunan Gedung *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Penanggulangan HIV AIDS *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Limbah Domestik *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Blitar, April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Kepariwisataan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 22 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Perubahan Atas Perauran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 22 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Malang *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 23 April 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2019-2023 *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 3 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Analisis Standar Belanja *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 6 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang terkait tentang Rencana Kerja layak anak . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Pasuruan, 6 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 6 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Pasuruan Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 7 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 7 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada DPRD Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 7 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Pasuruan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Garam Konsumsi Beriodium *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 7 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada kabupaten Malang Tentang Perubahan Atas Perauran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (lanjutan) *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 8 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Parkir *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 10 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 10 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 20 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Daerah Kota Malang Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Online . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 27 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 28 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kota Malang Tentang Kepemudaan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso, 29 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Bondowoso Tentang Pengarustamaan Gender . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso, 29 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada Kabupaten Bondowoso Tentang Kabupaten Layak Anak *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 17 Juni 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Perubahan Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah BPR Tugu Artha Menjadi Perusahaan Peseroan Daerah BPR Tugu Artha Sejahtera *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 18 Juni 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Perubahan Badan Hukum dan Nama Kegiatan Usaha Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 21 Juni 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Ketertiban Umum Hewan Kabupaten Malang

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,15 Januari 2018	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 22 Januari 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 22 Januari 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 23 Januari 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 4 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Batu terkait Tentang Pasar Rakyat *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 4 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Batu terkait Tentang Kota Layak Anak *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo terkait tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tulungagung Tentang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tulungagung Tentang Tentang Penaggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tulungagung *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 7 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kota Mojokerto terkait tentang Penanggulangan Kemiskinan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 14 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lamongan terkait tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 14 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sidoarjo Tentang Tenaga Kesehatan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 18 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sidoarjo Tentang Tenaga Kesehatan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 18 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Madiun Tentang Perkindungan Pekerja Migran Indonesia *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 19 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo Tentang Penanggulangan Kemiskinan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 19 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo terkait tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 25 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Probolinggo terkait tentang Minuman Beralkohol. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 28 Februari 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Mojokerto *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 4 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Surabaya, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 4 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Surabaya, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Provinsi Jawa Timur, 5 Maret 2019	Daerah Kota Madiun, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 5 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Surabaya, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 11 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 11 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			hardcopy dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 12 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah kabupaten Malang, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 12 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Malang, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 13 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 13 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 18 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Batu, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 18 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 19 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 20 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Kediri, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut,

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 25 Maret 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kota Madiun, 1 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Madiun, 1 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lumajang, 02 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bangkalan, 04 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota malang, 08 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Malang , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Kediri, 09 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Kediri, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 16 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Gresik, 29 April 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Trenggalek, 06 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Trenggalek tentang Pendanaan Pendidikan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Trenggalek, 06 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Trenggalek tentang Kesejahteraan Sosial *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lamongan, 08 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten lamongan tentang Kabupaten Layak Anak *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lamongan, 08 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten lamongan tentang Penyelenggaraan Kearsipan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso, 08 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bondowoso tentang

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Kabupaten Bondowoso *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso, 08 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bondowoso tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2034 *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang, 13 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kota Malang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Kediri, 14 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Tuban, 16 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sidoarjo Tentang Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD R. Ali Mansyur Kabupatyen Tuban *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Gresik, 20 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Gresik tentang Perubahan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo, 21 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang Pencabutan 4 Peraturan Daerah Kota Problinggo . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo, 21 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang Pelayanan Publik . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo, 21 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang Penetapan Pembinaan Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Tulungagung, 22 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tulungagung tentang Pengelolaan Keuangan Desa *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Tulungagung, 22 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tulungagung tentang Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota malang, 23 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Peraturan kota Malang tentang Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Badan Layanan Daerah Puskesmas Kota Malang *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten madiun, 24 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Madiun tentang Perubahan atas Pertauran Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten madiun, 24 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten madiun, 24 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten madiun, 24 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Madiun tentang Pengarusutamaan Gender *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lamongan, 28 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten lamongan tentang

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lamongan, 28 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten lamongan tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan, 29 Mei 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Pasuruan tentang Perubahan atas Peratiran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang, 12 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malang , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabupaten Malang, 17 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kabupaten Madiun, 17 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabupaten Madiun, 17 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 18 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan, 18 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabuipaten Mojokerto, 19 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabuapten Mojokerto , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabuipaten Mojokerto, 19 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabuapten Mojokerto , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabuipaten Mojokerto, 20 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabuapten Mojokerto , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabuipaten Mojokerto, 20 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabuapten Mojokerto , dan turut dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabupaten Lamongan, 20 Juni 2019	*Output* berupa tanggapan hasil kajian, yang kemudian dipaparkan pada saat rapat yang diselenggarakan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabuapten Mojokerto , dan turut

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			dihadiri oleh OPD Pemrakarsa. Kemudian *hardcopy* dan *softcopy* tanggapan diserahkan kepada Bagian Hukum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kab. Banyuwangi, 03 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Banyuwangi tentang pedoman pemilihan, pergantian, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Banyuwangi, 03 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Banyuwangi tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Madiun, 4 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Madiun tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Madiun, 4 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Madiun tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Madiun, 4 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Madiun tentang Sistem Kesehatan Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Jombang, 08 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Jombang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Situbondo 9 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Situbondo tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sumenep 10 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.sumenep tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang 12 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.malang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Malang 12 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.malang ttg Perubahan Perda 3/2013 ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Perda Kab. Bojonegoro 16 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro.. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Perda Kab. Bojonegoro 16 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Bojonegoro tentang Pelestarian Kesenian Tradisional *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 17 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.blitar tentang Penanaman Modal *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 17 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.blitar tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kab. Blitar 18 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.blitar tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor narkotika . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 18 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.blitar tentang Pembentukan dana Cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab Tuban 22 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 22 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.blitar tentang Perubahan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 22 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.blitar tentang Kepemudaan .

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sumenep 26 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.sumenep tentang Kepemudaan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sumenep 26 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.sumenep tentang Perseroda BPRS Karya Bhakti. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso 29 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bondowoso tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bodowoso 29 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bondowoso tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kabupaten Tuban 30 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban tentang Izin Lingkungan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Tuban 30 Juli 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Pacitan 01 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Pacitan tentang Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Beracun. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Kediri 05 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Kediri tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bondowoso tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Bondowoso 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bondowoso tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Trenggalek 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Trenggalek Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Kediri 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Kediri tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri 2019-2034. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Surabaya 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Surabaya 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Surabaya tentang Pengarustamaan Gender.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Surabaya 6 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Reklame. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Pasuruan 09 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Ngawi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Ngawi 07 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Banyuwangi tentang pedoman pemilihan, pergantian, pelantuikan dan pemberhentian kepala desa. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Ngawi 07 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Ngawi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 12 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Blitar tentang Badan Permusyawaratan Desa.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 12 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Blitar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan desa. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab Tuban 12 Agustus 2012	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Tuban tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Blitar 13 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Blitar tentang Penyelenggaraan Perijinan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Blitar 13 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Blitar tentang Upaya Kesehatan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kabupaten Bangkalan 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Bangkalan tentang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Bojonegoro 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang Pemberian Beasiswa Perguruan Tinggi . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Bojonegoro 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang Pengembangan dan PerlindunganKoperasi dan Usaha Mikro. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Ngawi 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Ngawi tentang BUMD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Ngawi 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Ngawi tentang Pembangunan, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kab. Ngawi 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Ngawi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Ngawi 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Ngawi tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Banyuwangi 14 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Banyuwangi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kota Malang 15 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Blitar 16 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Blitar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kabupaten Blitar 16 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Blitar tentang Alat Penerangan Jalan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 16 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Pajak Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 16 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Perubahan Ketiga atas peraturan daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 16 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Peraturan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Blitar 19 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Blitar tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Blitar 19 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Blitar tentang Sistem Penyediaan Air minum Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Kediri 19 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Kediri Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Kediri 19 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Kediri Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sidoarjo 20 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sidoarjo 20 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kabupaten Mojokerto tentang Perumda Mojopahit Mojokerto.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Mojokerto 25 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Banyuwangi tentang pedoman pemilihan, pergantian, pelantuikan dan pemberhentian kepala desa. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Jember 26 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Jember tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Jember 26 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Jember tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu di kabupaten Jember . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Nganjuk 26 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD tentang RIPAR Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2025. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Nganjuk 26 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah takmiliyah dan Pondok Pesantren *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Tulungagung 27 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Tulungagung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Pilitik . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Tulungagung 27 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Tulungagung tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sumenep 27 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sumenep tentang Pedoman pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kab. Banyuwangi 27 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Banyuwangi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Banyuwangi 27 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Banyuwangi tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengengkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 29 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kota Malang tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 30 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kota Malang tentang Analisis Standar Biaya. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 30 Agustus 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Peraturan Walikota Malang tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Cagar Budaya. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang PDAM . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang BUMD. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang BPRS Kota Mojokerto . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Ijin Gangguan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sampang 3 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Sampang tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sampang 3 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Sampang tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Cagar Budaya. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang PDAM. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang BUMD. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Ijin Gangguan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 2 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Ijin Gangguan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sampang 3 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Sampang tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Sampang 3 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Sampang tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Nganjuk 3 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Nganjuk tentang Pemberian Beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Nganjuk 3 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Nganjuk tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 04 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang Perumda Tugu Tirta Kota Malang. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Kediri 23 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Kediri 23 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Kediri Peraturan Daerah Kota Kediri Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo 10 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang Perubahan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Tarif Retribusi Jasa Umum pada Jenis retribusi Pengujian Kendaraan bermotor. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo 10 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Transportasi Pelajar . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lamongan 16 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan tempat rekreasi dan Olahraga. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Lamongan 16 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabuapten Banyuwangi 17 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Banyuwangi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kabuapten Banyuwangi 17 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sampang 24 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sampang tentang Kabupaten Sampang Seribu Pesantren . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sampang 24 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sampang tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Lamongan 24 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lamongan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Lamongan 24 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Lamongan tentang Pengarustamaan Gender . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kabupaten Pasuruan 24 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Pasuruan 24 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Pasuruan tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sumenep 25 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sumenep tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Sumenep 25 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Sumenep Tentang Penataan Drainase *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kabupaten Jombang 30 September 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kabupaten Jombang tentang Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kab. Trenggalek 11 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Trenggalek tentang APBD Tahun 2020 . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Bojonegoro 14 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Bojonegoro tentang tambahan penghasilan pegawai *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Bojonegoro 14 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang Indeks Percepatan Pembangunan Desa *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Bojonegoro 14 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Bojonegoro tentang SOTK Dinas Kesehatan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 22 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kab.Sidoarjo 1 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Sidoarjo tentang penyelenggaraan perpakiran. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kota Malang 28 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang pengelolaan BMD. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kab.Gresik 30 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Gresik tentang Perumda Giri Tirta. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Kab. Trenggalek 14 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Raperda Kab. Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Trenggalek. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Trenggalek 18 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Trenggalek tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kab.Nganjuk 24 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Nganjuk tentang Pendidikan Anti Korupsi. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Nganjuk 24 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Nganjuk tentang Perubahan Atas Perbup Nganjuk nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah kab.nganjuk. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Nganjuk 24 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Nganjuk tentang Perubahan Atas Perbup Nganjuk nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah kab.nganjuk. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Trenggalek 25 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Trenggalek tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 28 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang BMD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Malang 28 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang TGR. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 28 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Inventarisasi BMD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 28 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Tugu Aneka Usaha. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Mojokerto 29 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pendidikan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 7 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Sumber Daya Alam. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 7 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Dinas Pertanian. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 7 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Dinas Perhubungan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 7 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT PU dan Bina Marga. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 8 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Lingkungan hidup. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 8 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Disperindag. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Bojonegoro 8 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Peternakan dan Perikanan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kab.Bojonegoro 8 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Perdagangan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Trenggalek 14 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Lingkungan hidup. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Trenggalek 25 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Disperindag. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Trenggalek 11 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Bojonegoro tentang SOTK UPT Peternakan dan Perikanan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Probolinggo 31 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang pengelolaan BMD. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 23 Oktober 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota malang tentang pengelolaan sampah. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kota Malang 28 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Pemusnahan dan Penghapusan BMD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 7 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang Tentang Penetapan rencana strategis perangkat daerah tahun 2018-2023 . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 25 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang ttg tata cara pengadaan dana penggunaan BMD *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Tulungagung 7 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung ttg perubahan kedua atas perd a nomor 20 tahun 2016 ttg pembentukan dan susunan perangkat daerah kab.Tulungagung . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Tulungagung 7 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung ttg pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Nganjuk 14 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Nganjuk ttg pedoman umum

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat desa/kelurahan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Nganjuk 14 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Nganjuk ttg lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat desa/kelurahan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Jember 18 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.Jember ttg pendirian perumda air minum tirta pandalungan jember. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Jember 19 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Jember Tentang penyertaan modal pada pdp kahyangan. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Jember 20 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Jember ttg perubahan perda nomor 4 tahun 2011 ttg retribusi jasa umum *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Jember 21 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD kab.Jember ttg ttg perubahan perda nomor 5 tahun 2011 ttg retribusi jasa usaha.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			Outcome berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Jember 22 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Jember ttg perubahan perda nomor 6 tahun 2011 ttg perijinan tertentu. *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota probolinggo 7 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang perumda air minum bayuangga . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota probolinggo 22 November 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Probolinggo tentang PPNS . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 6 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang Retribusi Jasa Usaha . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Madiun 20 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Madiun tentang perubahan atas peda kab.madiun nomor 8 tahun 2017 ttg hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kab.madiun . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Madiun 20 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Madiun tentang pencabutan atas perda kab.madiun nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan masyrakat desa/kelurahan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Malang 10 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Malang tentang perubahan perda kab.malang nomor 2 tahun 2016 ttg desa . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Malang 10 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Malang tentang perubahan perda kab.malang nomor 9 tahun 2010 ttg retribusi tertentu . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab. Blitar 27 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab. Blitar tentang pendirian rumah sakit umum daerah srengat . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 5 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang Tata cara penilaian dan pemindahtanganan BMD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
			kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 6 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang perubahan peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 ttg tata tertib DPRD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Tulungagung 10 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung ttg pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Tulungagung 10 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung ttg pengelolaan keuangan daerah . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Tulungagung 10 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung tentang Pelaataran Parkir Mobil Barang . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Tulungagung 11 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung tentang perubahan kedua atas perda nomor 2 tahun 2012 ttg penyelenggaraan dan pelayanan pasar *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

NO	Kegiatan	Tempat/ Tanggal	Uraian Kegiatan
		Kab.Tulungagung 11 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung tentang retribusi kesehatan pada unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kab.tulungagung . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kota Malang 3 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kota Malang tentang pengamanan dan pemeliharaan BMD . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Sidoarjo 4 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Sidoarjo tentang perubahan atas peprda kab.sidoarjo nomor 8 tahun 2015 ttg pemilihan kepala desa *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Sidoarjo 4 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Sidoarjo tentang penyelenggaraan kearsipan . *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Sidoarjo 18 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Sidoarjo tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan *Outcome* berupa perubahan beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar lebih selaras dengan kaidah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Kab.Tulungagung 11 Desember 2019	*Output* kegiatan berupa pemahaman kepada OPD Kab.Tulungagung tentang retribusi